
Konsep Dan Praktik Manajemen Pembiayaan Di Lembaga Pendidikan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Fachrizaral Nover ISSN: 2807-7474
Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi Vol. 5, No. 1, April 2025
Fahrizalnover9495@gmail.com <http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/seduj>

Kasful Anwar Us
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
kasfulanwar@uinjambi.ac.id

Shalahudin
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
shalahudin@uinjambi.ac.id

© 2025 Unsultra All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Nover, F., Us, K. A., & Shalahudin. (2025). Konsep dan Praktik Manajemen Pembiayaan di Lembaga Pendidikan. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 56-64.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan sebagai elemen kunci dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai literatur yang relevan untuk menggambarkan pentingnya prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan yang terencana dan inovatif memungkinkan lembaga pendidikan mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, tenaga pendidik, dan pengembangan kurikulum. Sinergi antara berbagai sumber pendanaan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, juga menjadi strategi penting dalam mengatasi tantangan pembiayaan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses dan fasilitas pendidikan. Kesimpulannya, praktik manajemen pembiayaan yang efektif tidak hanya mendukung keberlangsungan operasional lembaga pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan, sehingga mampu mencetak generasi yang kompeten, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global.

Kata Kunci: Manajemen Pendidikan, Pembiayaan, Konsep, Praktik, Lembaga Pendidikan

Abstract

This study aims to analyze the concept and practice of financing management in educational institutions as a key element in supporting the achievement of quality, inclusive, and sustainable education goals. Using a literature study method, this study examines various relevant literature to illustrate the importance of the principles of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability in the financial management of educational institutions. The results of the study indicate that planned and innovative financing management allows educational institutions to optimize financial resources to meet the needs of infrastructure, teaching staff, and curriculum development. Synergy between various funding sources, such as government, community, and private sector, is also an important strategy in overcoming financing challenges, especially in areas with limited access and educational facilities. In conclusion, effective financing management practices not only support the sustainability of educational institutions' operations, but also contribute to improving the overall quality of education, so that they are able to produce a competent, competitive generation that is ready to face global challenges.

Keywords: Educational Management, Financing, Concepts, Practices, Educational Institutions

A. Pendahuluan

Di antara semua sumber daya yang dinilai dalam pendidikan, uang adalah yang terpenting. Pendidikan tidak dapat berfungsi tanpa adanya sumber daya keuangan. Jumlah mata uang ini terbatas. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan, dana harus ditangani secara kompeten dan efisien. Pendanaan untuk pendidikan merupakan komponen penting dari setiap sistem pendidikan yang efektif. Ketersediaannya sebagai alat penting untuk mencapai tujuan pendidikan kuantitatif dan kualitatif sangatlah berpengaruh. Pendanaan merupakan bagian integral dari setiap peluncuran program pendidikan (Hermawan, 2010).

Penting untuk memastikan bahwa pendanaan ini digunakan sesuai dengan persyaratan. Istilah "manajemen pembiayaan pendidikan" mencakup semua tugas yang berkaitan dengan alokasi, pengeluaran, dan pelacakan pendanaan sekolah atau lembaga. Kerangka Kerja untuk Administrasi Dana Pendidikan. Seberapa baik sekolah menangani anggaran mereka memiliki dampak langsung pada tingkat pendidikan yang diperoleh siswa. Dalam hal manajemen fiskal, salah satu hal terpenting yang perlu dilakukan sekolah adalah menghasilkan siswa yang baik, atau hasil pendidikan. Administrasi dana sekolah yang tepat sangat penting karena memengaruhi pelaksanaan berbagai program pendidikan (Rahmah, 2016).

Agar keuangan saat ini dapat digunakan secara efektif untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan, komponen-komponen yang berkaitan dengan keuangan dan pendanaan sekolah harus dikelola seefisien mungkin. Berinvestasi dalam pendidikan berkualitas tinggi bisa sangat mahal. Meningkatkan kesadaran publik tentang perlunya membiayai pendidikan akan memberi masyarakat kewenangan untuk bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Salah satu jenis organisasi publik adalah organisasi pendidikan, dan dianggap sebagai nirlaba. Menurut tujuan dan fitur pendidikan, manajemen keuangan sangat berbeda (Andiawati, 2017).

Konsep manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan mencakup serangkaian proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan dana. Dalam tahap perencanaan, lembaga pendidikan perlu mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan prioritas program kerja yang telah disusun. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan sumber dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat, maupun sumber lainnya seperti kerjasama dengan pihak swasta. Proses pengorganisasian kemudian dilakukan untuk memastikan adanya struktur yang jelas dalam pengelolaan keuangan, termasuk pembentukan tim manajemen keuangan yang kompeten dan profesional (Sugeng, 2017).

Dalam praktiknya, pelaksanaan manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya partisipasi masyarakat, dan fluktuasi kebutuhan yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan keuangan. Misalnya, lembaga pendidikan dapat

menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat memantau penggunaan dana secara terbuka (Kartika et al., 2023).

Evaluasi merupakan tahap akhir yang tidak kalah penting, di mana lembaga pendidikan menilai sejauh mana penggunaan dana telah sesuai dengan rencana awal dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan keuangan di masa depan, sekaligus meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap lembaga pendidikan. Dengan menerapkan konsep dan praktik manajemen pembiayaan yang baik, lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan (Mulyanti, 2017).

Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, manajemen pembiayaan memegang peran sentral sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pengelolaan lembaga pendidikan. Sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak generasi penerus bangsa, lembaga pendidikan membutuhkan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik untuk memastikan keberlangsungan operasional, peningkatan fasilitas, serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan siswa. Namun, tantangan dalam manajemen pembiayaan kerap muncul akibat keterbatasan dana, ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, konsep dan praktik manajemen pembiayaan yang efektif menjadi sangat penting untuk menjamin alokasi sumber daya secara efisien, meningkatkan daya saing lembaga, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

B. Metodologi

Metode penelitian studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep dan praktik manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah dokumen-dokumen seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, kebijakan pendidikan, dan sumber tepercaya lainnya yang membahas topik terkait. Data yang dikumpulkan difokuskan pada informasi mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, tantangan dalam manajemen pembiayaan, serta solusi inovatif yang diterapkan di berbagai lembaga pendidikan.

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar variabel yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis ini melibatkan proses klasifikasi data berdasarkan kategori tertentu, seperti prinsip manajemen pembiayaan, sumber pendanaan, dan strategi pengelolaan, untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang subjek yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat menyajikan sintesis dari berbagai pandangan dan pengalaman yang diungkapkan dalam literatur, sehingga memberikan gambaran yang holistik dan mendalam tentang manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan.

C. Hasil & Pembahasan

1) Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan

Konsep pembiayaan pendidikan merujuk pada serangkaian kebijakan, strategi, dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola sumber daya keuangan demi mendukung penyelenggaraan proses pendidikan secara optimal. Pembiayaan pendidikan melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran, pengalokasian dana, hingga pengawasan dan evaluasi penggunaannya. Secara umum, pembiayaan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa semua komponen pendidikan, seperti infrastruktur, tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, serta kebutuhan operasional lainnya, dapat terpenuhi secara memadai (Mesiono & Haidir, 2020).

Dalam konteks yang lebih luas, pembiayaan pendidikan juga mencakup upaya untuk menciptakan akses yang setara bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, sehingga tidak ada hambatan finansial dalam memperoleh pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan dapat berasal dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, donor internasional, hingga kontribusi sektor swasta. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan harus berorientasi pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas guna

memastikan penggunaan dana benar-benar memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan(Sudarmono et al., 2020).

Kemampuan sekolah dalam mengelola anggaran secara efektif merupakan tolok ukur pembiayaannya. Anggaran sekolah setara dengan nilai total semua sumber daya input, yang dinyatakan dalam rupiah. Menemukan cara terbaik untuk membelanjakan uang untuk pendidikan sama pentingnya dengan menganalisis dari mana uang itu berasal. Sistem pendidikan dapat mencapai lebih banyak hal dengan jumlah uang yang sama jika lebih efisien. Istilah "manajemen pembiayaan pendidikan" mencakup semua tugas yang berkaitan dengan alokasi, pengeluaran, dan pelacakan pendanaan sekolah atau lembaga. Tiga aspek utama manajemen keuangan adalah perencanaan, pencatatan, dan pemantauan pengeluaran dan pendapatan(Aflaha et al., 2021).

Penganggaran adalah proses pengalokasian dana yang akan digunakan untuk melaksanakan program pendidikan. Secara sederhana, manajemen keuangan adalah proses pengawasan operasi moneter(Rusdiana, 2021).

- a) Perencanaan keuangan, yang didefinisikan sebagai proses pengalokasian semua sumber daya yang tersedia secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa konsekuensi yang tidak diinginkan, merupakan salah satu komponen manajemen keuangan (Jones, 1985).
- b) Melaksanakan rencana (yang memerlukan akuntansi) adalah tindakan yang mengikuti rencana.
- c) Evaluasi, yaitu memeriksa seberapa baik tujuan tercapai.

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi merupakan tiga komponen utama pembiayaan pendidikan, yang sering disebut manajemen keuangan pendidikan. Perencanaan keuangan merupakan proses mengalokasikan sumber daya secara cermat untuk mencapai tujuan dengan cara yang meminimalkan risiko. Sebaliknya, akuntansi merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi merupakan metode untuk mengukur apakah kegiatan yang disponsori berhasil mencapai tujuannya atau tidak(Aripin & Nugraha, 2024). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan pendidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mengendalikan dan mengawasi sumber daya keuangannya, dimulai dari penganggaran, pelacakan, pengeluaran, pengawasan, dan akuntabilitas. Penganggaran, akuntansi, dan audit merupakan tiga pilar utama manajemen keuangan sekolah. Ketiga komponen utama tersebut harus ditangani secara ahli agar manajemen keuangan pendidikan dapat berjalan efisien dan produktif dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan(Mesiono & Roslaeni, 2021).

Penganggaran pendidikan merupakan nama lain untuk proses pembuatan rencana pengeluaran lembaga pendidikan. Dua komponen utama anggaran adalah pendapatan dan pengeluaran. Sisi pendapatan atau perolehan biaya ditentukan oleh jumlah dana yang diterima oleh suatu lembaga dari suatu sumber. Dalam membahas anggaran sekolah, berbagai kelompok mengidentifikasi sumber pendanaan yang berbeda, seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, dan lain-lain. Namun, pada sisi pengeluaran, Anda akan menemukan rincian tentang berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membayar setiap bagian dari sistem pendidikan(Fattah, 2008).

Oleh karena itu, anggaran tidak hanya menjabarkan tindakan yang direncanakan suatu organisasi, tetapi juga merinci pendapatan dan pengeluaran yang akan berkontribusi pada keseluruhan anggaran selama jangka waktu tertentu. Mengingat hal di atas, harus jelas bahwa anggaran pendidikan adalah sejumlah uang yang disisihkan untuk tujuan yang jelas untuk mendanai program dan kegiatan pendidikan. Perencanaan, sumber, tujuan, atau pengawasan yang berbeda terhadap penggunaan anggaran terlibat di setiap tingkatan dalam penentuannya. Di tingkat nasional, misalnya, anggaran pendidikan, sumbernya, dan tujuannya diputuskan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, di tingkat sekolah, anggaran dikembangkan dan dilaksanakan oleh administrasi dan fakultas, dimulai dengan persiapan dan pelaksanaan program sekolah yang disepakati. Seperti jenis operasi keuangan lainnya, manajemen pembiayaan pendidikan memerlukan tiga langkah berikut(Fattah, 2008):

Pertama, membuat anggaran dikenal dengan istilah penganggaran. Rencana operasional yang dikuantifikasi dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu disebut anggaran. Dengan cara ini, anggaran merinci upaya yang ingin dilakukan oleh suatu organisasi. Anggaran adalah alat untuk mewujudkan rencana. Sejumlah pihak yang berwenang

terlibat dalam proses penganggaran ini, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk mengalokasikan biaya.

Kedua, pelaporan keuangan. Dalam hal mengelola uang, akuntansi mencakup dua hal: pertama, memiliki kewenangan untuk memutuskan bagaimana uang diterima atau dibelanjakan, dan kedua, menangani proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang yang sebenarnya. Manajemen yang relevan, yang disebut sebagai manajemen bendahara, tidak mencakup kewenangan untuk memutuskan, tetapi hanya untuk melaksanakan. Siapa pun atau entitas mana pun yang bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, dan mencairkan dana, surat, dan barang berharga dikenal sebagai bendahara. Apa pun tanggung jawab atau tugas bendahara, ia harus memenuhinya.

Ketiga, pemeriksaan dan audit. Akuntabilitas atas semua tindakan yang dilakukan bendahara terkait penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyaluran dana untuk keperluan bersama merupakan inti dari audit. Di tingkat unit, satuan kerja, atau lembaga, orang yang berbeda bertanggung jawab untuk menerima laporan akuntabilitas dan melaksanakan pemeriksaan. Unit dalam suatu departemen, misalnya, melapor kepada BPK mengenai masalah ini melalui departemen mereka sendiri.

Dalam hal mengelola uang dan pendanaan pendidikan, ada beberapa faktor penting yang perlu diingat. Pengeluaran untuk pendidikan diketahui meningkat seiring waktu, dengan komponen-komponen berikut yang membentuk unit biaya yang digunakan untuk menghitung pembiayaan pendidikan (Ferdin, 2013): 1) Total biaya unit, atau biaya per unit berdasarkan semua materi yang disediakan untuk tujuan pendidikan. 2) Biaya unit yang hanya terisi sebagian, dengan mempertimbangkan hanya biaya yang terkait dengan materi dan peralatan yang digunakan sepanjang waktu, terlepas dari durasinya. 3) Biaya unit yang sempit, yang didefinisikan sebagai biaya unit yang secara eksklusif berasal dari biaya yang secara langsung terkait dengan biaya lain yang terkait dengan pembelajaran dan pengajaran.

Tentu saja, setelah pengelola keuangan, bendahara, atau perencana memiliki pemahaman yang kuat tentang seluk-beluk pembiayaan pendidikan, mereka dapat dengan yakin memperkirakan kebutuhan pendanaan proses layanan pendidikan dan mengidentifikasi sumber pendanaan yang potensial. Sekolah siap untuk memenuhi harapan siswa dengan menawarkan layanan kelas satu dan pendidikan berkualitas tinggi.

2) Praktik Pembiayaan di Lembaga Pendidikan

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki andil dalam pembiayaan pendidikan, sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tuntutan sekolah, khususnya kebutuhan pengembangan pembelajaran yang membutuhkan biaya relatif tinggi, mengharuskan sekolah untuk mencari sumber pendapatan dari berbagai sumber guna membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Selain itu, sekolah harus melakukan upaya mandiri untuk mencari dana. Jika inovasi dan manajemen sekolah terjaga dengan baik, hal tersebut akan tercapai.

Proses pengelolaan keuangan diawali dengan perencanaan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seseorang harus melakukan proses perencanaan, yaitu prosedur yang metodis dan logis untuk mengidentifikasi tindakan tertentu yang akan diambil. Di antara komponen definisi ini adalah sebagai berikut: suatu proses, kegiatan yang wajar dan sistematis, dan tujuan yang akan dicapai. Suatu kegiatan tidak dapat direncanakan secara tergesa-gesa jika harus dilihat sebagai suatu proses. Sasaran pengembangan sekolah jangka panjang dan jangka pendek diperhitungkan saat merencanakan pendanaan sekolah. Jangka waktu pengembangan untuk proyek jangka pendek adalah satu tahun. Rencana lima, sepuluh, atau bahkan dua puluh lima tahun merupakan hal yang umum untuk pengembangan jangka panjang. Rencana untuk pendanaan sekolah jangka pendek dan jangka panjang didasarkan pada rencana pengembangan lembaga pendidikan (Arsyad, 2018).

Urutan perencanaan pembiayaan strategis yang harus diikuti saat memeriksa pembuatan rencana pembiayaan (Fihana, 2024):

1. Tujuan
2. Sasaran untuk masa depan
3. Sasaran atau tujuan untuk jangka pendek
4. Program, layanan, dan kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat;
5. Sasaran dan tujuan yang terikat waktu dan berdasarkan situasi untuk unit sekolah;
6. Hasil dan target yang berorientasi pada hasil
7. Rencana Keuangan
8. Rencana Pembiayaan Strategis.

Selain itu, tujuan harus menyoroti kondisi atau keadaan tertentu yang perlu dicapai,

daripada selalu dinyatakan dalam bentuk angka. Dengan menggunakan indikator dan alat pemantauan, tujuan dapat didefinisikan secara lebih praktis. Pengembangan tujuan, kebijakan, program, dan tindakan untuk mencapai tujuan akan dipandu oleh tujuan. Landasan yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja harus disediakan oleh tujuan. Tujuan komunitas adalah hal-hal yang diharapkan untuk dilakukan atau diciptakan dalam waktu dekat selama jangka waktu tertentu, baik itu setahun, satu semester, satu kuartal, atau bahkan satu bulan (Imron, 2016).

Tujuan harus menentukan hasil yang diinginkan dengan menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mendapatkan hasil tersebut. Agar tetap fokus dan menyelesaikan tugas yang khusus, terperinci, terukur, dan dapat dicapai, akan sangat membantu untuk menetapkan tujuan. Ini dapat berarti bahwa rencana keuangan perusahaan akan berjalan lebih baik jika berfokus pada pemenuhan tujuan dan sasaran perusahaan. Efisiensi pembiayaan sekolah yang baik dapat ditingkatkan jika perencanaan dipandu oleh visi dan misi. Semua sekolah wajib memiliki dokumen tahunan yang disebut Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Anggaran ini tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan untuk pengeluaran dan penggalangan dana, tetapi juga berfungsi untuk meminta pertanggungjawaban sekolah atas dana yang diterimanya. Dengan menerapkan RAPBS ini, baik sekolah maupun Komite Sekolah dapat yakin bahwa kontribusi mereka akan digunakan dengan tepat (Nurhalimah, 2019).

Pemahaman menyeluruh tentang berbagai pengeluaran terkait pembiayaan merupakan langkah awal yang penting dalam perencanaan pembiayaan. Berikut ini adalah kategori pengeluaran (Pancarini et al., 2022):

a) Biaya Awal

Istilah "biaya pendidikan" mengacu pada semua uang yang dibelanjakan sekolah untuk hal-hal seperti ruang kelas, transportasi, dan gaji guru, serta pengeluaran lain yang terkait dengan proses belajar mengajar.

b) Biaya Tidak Langsung

Siswa menanggung biaya tidak langsung ketika mereka mengabaikan potensi keuntungan karena waktu dan tenaga yang mereka curahkan untuk belajar. Biaya sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan biaya hidup siswa (kadang-kadang dikenal sebagai biaya rumah tangga) adalah contoh biaya pribadi yang dikeluarkan keluarga untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi. Lebih jauh, ada biaya sosial, yang sering dikenal sebagai biaya publik, yang mencakup berbagai pengeluaran yang harus ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan untuk mendanai pendidikan, baik secara langsung melalui sekolah maupun secara tidak langsung melalui pajak yang dikumpulkan dan digunakan pemerintah untuk mendanai pendidikan. Komponen terakhir adalah biaya, yang bisa berupa uang atau non-uang.

Pendapatan dan pengeluaran juga dikaitkan dengan dua bagian anggaran. Pendanaan tahunan untuk sekolah berasal dari berbagai sumber resmi, dan jumlah ini dikenal sebagai anggaran pendapatan. Setiap tahun, sejumlah uang dialokasikan untuk pendidikan di sekolah sebagai bagian dari anggaran dasar untuk pengeluaran. Rencana anggaran, yang merupakan nama lain untuk rencana pendanaan, memerlukan pemikiran tentang rincian berikut (Andriani et al., 2024):

1. Mencari tahu apa yang akan dilakukan dalam periode anggaran.
2. Menemukan asal mata uang, layanan, dan produk.
3. Karena uang pada dasarnya adalah laporan keuangan, ia digunakan untuk mengekspresikan semua sumber.
4. Membuat anggaran menurut model yang sudah digunakan oleh organisasi lain.
5. Mendapatkan persetujuan pihak yang berwenang atas permintaan anggaran.
6. Menelaah kembali anggaran yang diusulkan.
7. Meninjau dan menyetujui anggaran yang direvisi.
8. Persetujuan anggaran.

Berdasarkan informasi yang diberikan, tampaknya RAPBS disusun dengan terlebih dahulu menilai tuntutan operasional sekolah, termasuk yang terkait langsung dengan pelaksanaan proses belajar mengajar serta yang memberikan dukungan yang diperlukan. RAPBS disusun sesuai dengan visi, tujuan, sasaran, dan strategi sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana ditetapkan oleh administrasi, fakultas, dan staf.

Tugas akuntansi dan pembukuan diperlukan untuk pelaksanaan anggaran pendidikan. Bagian pertama dari pembukuan adalah manajemen, yang meliputi pengambilan keputusan tentang cara membelanjakan atau menerima dana, dan bagian kedua adalah tindak lanjut, yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti ini. Manajemen bendahara adalah nama lain untuk jenis

manajemen kedua. Dana pembelajaran perlu digunakan untuk membiayai beberapa komponen (Usman, 2016).

Sebagai hasil dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, mekanisme pembiayaan sekolah negeri di Indonesia telah berkembang. Sistem pengawasan dan keseimbangan saat ini memungkinkan uang mengalir dari pemerintah federal ke negara bagian dan daerah, dengan penekanan khusus pada hibah blok yang dikenal sebagai dana alokasi umum (DAU). Distribusi ini memberi pemerintah daerah lebih banyak stabilitas terkait waktu dan jumlah pendanaan mereka. Pemerintah daerah juga memiliki keleluasaan dalam cara mereka membelanjakan uang, yang memungkinkan mereka untuk menetapkan prioritas pembangunan di daerah mereka dan mencairkan dana sesuai dengan itu. Dana bagi hasil dan dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana perimbangan tambahan yang diperoleh daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DAU juga merupakan salah satu dana tersebut. Pinjaman daerah, PAD, dan pendapatan sah lainnya juga memberikan kontribusi pada kas daerah. Dalam konteks desentralisasi, APBD mencatat dan mengelola semua pendapatan dan pengeluaran.

Mekanisme pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi serta mekanisme dana perimbangan bekerja sama untuk menyediakan dana pusat bagi daerah. Meskipun dinas (teknis) provinsi bertanggung jawab untuk melaksanakan operasi desentralisasi, pemerintah provinsi juga bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas desentralisasi (Muhajir et al., 2023). Departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang sesuai menyalurkan dana dari APBN kepada gubernur untuk mencapai desentralisasi. Identik dengan anggaran desentralisasi, anggaran tugas pendukung dapat dibagikan kepada kabupaten/kota, bahkan desa-desa. Pemerintah pusat meminta departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen yang menugaskan bertanggung jawab langsung atas pemanfaatan dana desentralisasi dan tanggung jawab bantuan. Ada pemisahan antara administrasi dana desentralisasi dan administrasi tugas bantuan.

Di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional mendelegasikan kekuasaan dan dana terkait desentralisasi kepada gubernur, yang selanjutnya mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan kepada kantor pendidikan provinsi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Nasional melimpahkan tanggung jawab dan pendanaan tugas pembantuan kepada dinas pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan hingga ke desa. Mengingat bahwa kewenangan di bidang pendidikan dasar dan menengah saat ini berada di tangan daerah, khususnya pemerintah kabupaten dan kota, sudah seharusnya lembaga-lembaga tersebut menangani sebagian besar masalah pendidikan, seperti penyaluran dana. Dengan demikian, fokus pemerintah kabupaten dan kota terhadap pendidikan akan berdampak signifikan terhadap masa depan pendidikan nasional.

Seperti yang terlihat dari besarnya anggaran APBN yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat, pemerintah pusat tetap memegang peranan penting dalam menyediakan dana pembangunan secara keseluruhan. Reformasi pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas bagi seluruh siswa akan terus menjadi prioritas pemerintah pusat. Anggaran pendidikan, jika direalisasikan, harus sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang tersedia. Dana pendidikan selanjutnya dimanfaatkan dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sekolah. Merupakan praktik umum untuk mengalokasikan anggaran sekolah dengan mempertimbangkan ruang kelas, instruktur, dan siswa. Dana juga didistribusikan menurut metode alokasi keuangan, tingkat partisipasi siswa, dan kepentingan relatif dari berbagai tujuan pendidikan.

Pendekatan paling mudah untuk pendanaan siswa adalah dengan memanfaatkan perhitungan tengah semester, akhir tahun, dan awal tahun kumulatif. Karena dianggap mudah digunakan, metode ini sering digunakan untuk alokasi anggaran; namun, keakuratan data yang dihasilkannya biasanya terganggu karena kesederhanaannya. Rata-rata harian kehadiran siswa digunakan untuk menentukan tingkat ketidakhadiran dan putus sekolah guna menutupi kekurangan ini. Untuk mempermudah pelaporan, yang dapat dilakukan setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

Guru saat ini berbeda dalam hal latar belakang pendidikan, keahlian, apakah mereka guru kelas atau guru mata pelajaran, dan apakah mereka bekerja di kota atau desa. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini saat mengalokasikan dana untuk guru. Rasio siswa-guru dipengaruhi oleh bagaimana dana sekolah didistribusikan, dan ini terkadang dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, masalah mengenai kualitas pengajaran perlu dipikirkan secara serius.

Agar suatu kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan targetnya,

diperlukan pengawasan yang konstan. Bagian integral dari pelaksanaan strategi adalah pengawasan. Untuk memastikan pertumbuhan berjalan sesuai rencana, pengawasan ini dilakukan. Penyimpangan keuangan dan kemungkinan kesalahan pencatatan dapat dicegah melalui pengawasan. Inspeksi, pembinaan, dan penilaian adalah semua bentuk pengawasan struktural atau fungsional yang mungkin datang dari dalam atau luar organisasi (Wahyudin & Zohriah, 2023).

Melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran memungkinkan seseorang untuk belajar tentang (Purnomo & Putri, 2018): (a) seberapa baik anggaran dijalankan sehubungan dengan aturan dan ketentuan; (b) seberapa baik hasil dalam domain teknis administratif dan teknis operasional mengikuti aturan dan ketentuan; (c) seberapa baik sumber daya saat ini (manusia, keuangan, peralatan, dan organisasi) digunakan; dan (d) sistem atau penyesuaian lain apa yang dapat dilakukan pada sistem untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Untuk menegaskan kembali, pengawasan adalah serangkaian tindakan yang digunakan untuk menjamin bahwa rencana diikuti selama pelaksanaan. Akibatnya, mengawasi seseorang seperti menjalani serangkaian langkah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, langkah-langkah yang terlibat dalam pengawasan meliputi pengenalan terhadap ketentuan pelaksanaan dan tantangan apa pun yang mungkin timbul, mendefinisikan tujuan pengawasan, menetapkan norma-norma untuk dijadikan pedoman, melakukan penilaian terhadap pelaksanaan, menganalisis dan menentukan alasan penyimpangan, mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut, dan akhirnya, menarik kesimpulan atau evaluasi (Gani et al., 2022).

Termasuk juga pengecekan hasil aktual terhadap target dan penyesuaian terhadap setiap ketidaksesuaian. Penyesuaian yang cepat dan mudah dapat dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian. Peran pengawasan keuangan adalah untuk mengawasi proses perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana. Perencanaan yang baik telah ditetapkan, diorganisasikan, dan dimotivasi, tetapi masih belum menjamin bahwa tujuan dapat tercapai, sehingga pengawasan tetap diperlukan (Fajri, 2018). Dalam bentuknya yang paling mendasar, pengawasan merupakan upaya aktif untuk mencegah penyimpangan apa pun dalam melaksanakan strategi yang telah ditentukan sebelumnya. Sejauh mana metode operasi sudah tepat dan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan pola organisasi; sejauh mana pelaksana sudah benar dan telah menempati posisi yang benar. Sangat penting bahwa setiap ketidaksesuaian atau kesalahan diperbaiki tanpa penundaan.

Pengendalian merupakan salah satu dari sekian banyak proses dalam proses perencanaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan program berjalan sesuai rencana. Kemampuan untuk menjaga agar segala sesuatunya terkendali memungkinkan deteksi dini dan mitigasi masalah, kemunduran, dan penyimpangan. Untuk memastikan bahwa operasi manajemen biaya dilakukan sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh kebijakan, pengendalian merupakan langkah yang krusial. Dalam upaya yang inovatif dan proaktif untuk melaksanakan tanggung jawab manajerial mereka, para pemimpin atau atasan langsung sering kali melakukan pengendalian.

D. Kesimpulan

Konsep dan praktik manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan merupakan elemen kunci dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, lembaga pendidikan dapat mengelola sumber daya keuangan dengan optimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari infrastruktur, tenaga pendidik, hingga pengembangan kurikulum. Selain itu, sinergi antara berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, menjadi strategi penting untuk mengatasi tantangan pembiayaan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses dan fasilitas pendidikan. Dengan pendekatan yang terencana dan inovatif, manajemen pembiayaan tidak hanya mendukung keberlangsungan operasional lembaga pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan, sehingga mampu mencetak generasi yang kompeten, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global.

E. Referensi

- Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U. C. (2021). Analisis standar pembiayaan pendidikan. *MASILE*, 2(1), 24–59.
- Andiawati, E. (2017). Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan/Sekolah. *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 170–185.
- Andriani, N., Ilyas, D., Hidayat, M., Rasmanah, C., & Nurjamiludin, I. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan melalui Integrasi Sumber-Sumber Pendanaan. *Jurnal Pelita Nusantara*, 2(2), 204–211.
- Aripin, J., & Nugraha, M. S. (2024). Konsep dan Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan. *Cipulus Edu: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 58–66.
- Arsyad, J. (2018). Otonomi Pendidikan Dan Pembiayaan Pendidikan. *SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kependidikan*, 3(2), 27–38.
- Fajri, A. (2018). Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 12(6).
- Fattah, N. (2008). Pembiayaan pendidikan: landasan teori dan studi empiris. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9, 1–4.
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.
- Fihana, M. Y. O. (2024). Strategi dan Konsep Teoritis dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(1), 189–208.
- Gani, F. D., Pananrangi, A. R., & Ismail, I. (2022). Pengaruh komitmen, sumber daya manajemen, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada dinas sosial provinsi sulawesi selatan. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 4(2), 79–84.
- Hermawan, R. (2010). Pengembangan sumber daya sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(1), 1–17.
- Imron, M. J. (2016). Manajemen pembiayaan sekolah. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 1(1), 69–93.
- Kartika, D., Mujahidin, E., Indra, H., Indupurnahayu, I., & Andriana, N. (2023). Perencanaan Keuangan Lembaga Pendidikan Islam. *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 134–155.
- Mesiono, M., & Haidir, H. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Hikmah*, 17(2), 61–73.
- Mesiono, M., & Roslaeni, R. (2021). Model-model pembiayaan pendidikan (analisis efektivitas dan efisiensi dalam institusi pendidikan). *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1), 1–18.
- Muhajir, N. M. N., Bachtiar, M., & Fauzi, A. (2023). Pentingnya Manajemen Pembiayaan dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 4684–4689.
- Mulyanti, D. (2017). Manajemen keuangan perusahaan. *Akurat/ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 8(2), 62–71.
- Nurhalimah, S. (2019). Konsep dan jenis pembiayaan pendidikan. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1).
- Pancarini, S., Soepini, D., & Yanto, R. (2022). Manajemen Pembiayaan Sekolah. *Unisan Jurnal*, 1(3), 354–361.
- Purnomo, B., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 467–480.
- Rahmah, N. (2016). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 73–77.
- Rusdiana. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. TRESNA BHAKTI Press Bandung.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2020). Pembiayaan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
- Sugeng, B. (2017). *Manajemen Keuangan*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Usman, J. (2016). Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 219–246.
- Wahyudin, A., & Zohriah, A. (2023). Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan. *Journal on Education*, 6(1), 3822–3835.